



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Blora, 06 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**. Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Isdiana Margayanti, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 43 Mlangsen, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada email nyonyaana12@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Mei 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor register 725/SK/2025/PA.Bla tanggal 15 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang terkait dalam perkara a quo;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak terkait di muka persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya tanggal 03 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 05 Mei 2025 dengan register Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON I**) belum menikah akan tetapi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 15 tahun 05 bulan ;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**

NIK : XXXX

Umur : 15 tahun 05 bulan

Tempat/tgl lahir : Blora, 04 Desember 2009

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Status : Perawan

Tempat tinggal : Xxx

Sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**

NIK : XXXXX

Umur : 21 tahun 05 bulan

Tempat/tgl lahir : Blora, 30 Desember 2003

Jenis kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Status : Jejaka

Tempat tinggal : XXXXX Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Gunadi bin Djayus (Alm) menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marsih binti Astro Wasiyah (Alm) pada tanggal 19 Mei 1990 sesuai kutipan akta nikah No. 54/42/1990 di catatkan di kantor urusan agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Mei 1990 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama CALON SUAMI umur 21 tahun 05 bulan;

Halaman 2 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora Jawa Tengah.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang - Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut **mendesak untuk segera dilaksanakan** karena:

- a. Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dan calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI**) telah berpacaran sejak bulan Januari 2024, kemudian pada bulan Juli 2024 dilamar oleh calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI**) jadi sejak 10 bulan yang lalu;
- b. Bahwa setelah anak Pemohon dilamar oleh calon suami anak Pemohon, hubungan keduanya semakin akrab sehingga calon suami anak Pemohon sering pergi berduaan keluar rumah sampai larut malam. Pemohon dan anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Xxxx, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan anak Pemohon juga sering berkunjung dirumah orang tua calon suami anak Pemohon.
- c. Bahwa antara anak Pemohon sudah sangat akrab dan benar-benar saling mencintai satu sama lain, tidak ingin terpisahkan serta sepakat untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri secara sah.
- d. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anak tersebut sudah berusaha menasehati keduanya agar bersedia menunda pelaksanaan perkawinan mereka sampai usianya mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi keduanya menolak dan bersikeras untuk melaksanakan perkawinan dengan segera karena anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) pada saat ini dalam kondisi **hamil ±28 minggu (7 bulan)**;

Halaman 3 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



e. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah.

f. Bahwa Pemohon merasa khawatir apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon, terjadi hal - hal yang tidak diinginkan.

g. Bahwa Pemohon merasa khawatir tidak bisa mengawasi serta khawatir akan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan baik di Puskesmas Japah, RSUD dr. R. Soetidjono Blora bagian psikolog dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (DKK) dengan hasil **dipertimbangkan dan dinyatakan layak untuk menikah dan sudah hamil ±28 minggu (7 bulan).**

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : 052/Kua.11.16.07/PW.01/04/2025 tertanggal 24 April 2025 dengan alasan belum memenuhi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

5. Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

6. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri/dan atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki - laki / calon suami anak Pemohon yang bernama (**CALON SUAMI**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil - adilnya

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Isdiana Margayanti, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Kolonel Sunandar No. 43 Mlangsen, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada email nyonyaana12@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Mei 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor register 725/SK/2025/PA.Bla tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal anggota advokat/pengacara;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat

Halaman 5 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan tetap menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan perkawinan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang isi dan maksudnya pada pokoknya terdapat perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang oleh Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara a quo yaitu bernama **Ajeng Auliya Anggreyani** (*selanjutnya disebut anak*), sedangkan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu bernama **Nikko Setiawan** (*selanjutnya disebut calon anak/calonnya anak/calonnya*);

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon tentang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak;
- Bahwa anak tersebut hidup di bawah pengawasan dan pemeliharaan orang tua anak, yaitu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai ayah sah karena saat hamil dan melahirkan anak, Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan anak Pemohon lahir di luar perkawinan;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 15 tahun 05 bulan dan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya;
- Bahwa calonnya anak sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena anak Pemohon telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak dan khawatir terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak tersebut karena keduanya telah mengaku kepada Pemohon dan kepada orang tua calonnya anak;

Halaman 6 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini dengan calonnya anak;
- Bahwa keinginan menikah berawal dari keinginan anak dan calon anak sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari Pemohon atau orang tua masing-masing atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada hutang piutang atau hutang budi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calonnya anak;
- Bahwa alasan mendesak yang Pemohon maksud yaitu karena anak tersebut telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan/intim dengan calonnya anak sehingga Pemohon khawatir anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak dan calonnya anak tersebut sudah menjalin hubungan sekitar 10 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 per bulan;
- Bahwa Pemohon melihat anak dan calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa Pemohon melihat bahwa anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 7 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara/darah atau sesusuan atau semenda yang dilarang menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan calonnya anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu anak dan calonnya anak apabila kelak setelah menikah mengalami masalah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;
- Bahwa apabila rencana pernikahan anak dan calonnya anak ditunda hingga cukup umur, Pemohon khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang perbuatan yang dilarang Agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calonnya anak yaitu yang bernama Gunadi dan Marsih di muka persidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada orang tua calonnya anak mengenai resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut orang tua calonnya anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan orang tua calonnya anak yang pada pokoknya orang tua calonnya anak memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calonnya anak adalah orang tua kandung dari calonnya anak;
- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah, yaitu sekitar 15 tahun 05 bulan;
- Bahwa umur calonnya anak sekarang yaitu sekitar 21 tahun 05 bulan;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak bahwa anak telah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;

Halaman 8 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa calonnya anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menikah yaitu keinginan dari calonnya anak dan anak sendiri;
- Bahwa alasan mendesak sehingga calonnya anak dan anak ingin segera menikah karena anak tersebut telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak sehingga dikhawatirkan anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak tersebut karena keduanya telah mengaku kepada orang tua masing-masing;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah kenal dan menjalin hubungan sekitar 10 bulan;
- Bahwa menurut ibu calonnya anak yaitu calonnya anak sebenarnya terpaksa untuk menikah dengan anak karena keadaan anak telah hamil dan didesak oleh Pemohon selaku ibunya anak. Menurut ayah calonnya anak bahwa tidak ada paksaan dari siapapun pada anak maupun pada calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau hutang materi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon anak melihat, bahwa anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah karena sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak, anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mentalnya untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 9 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa setahu orang tua calonnya anak, anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara calonnya anak dan anak sendiri tidak ada atau larangan untuk menikah mereka tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang menikah dan juga bukan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calonnya anak belum pernah menikah sebelumnya dan setahu orang tua calonnya anak bahwa anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orang tua calonnya anak siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan saat terjadi masalah setelah keduanya menikah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, orang tua calonnya anak khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang perbuatan yang dilarang Agama;

Bahwa, Pemohon telah mengahdirkan calonnya anak yang bernama Nikko Setiawan di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada calonnya anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut calonnya anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa dan mendengar keterangan calonnya anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calonnya anak adalah anak kandung dari orang tuanya yaitu Gunadi dan Marsih;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 15 tahun 05 bulan, sedangkan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun 05 bulan;

Halaman 10 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa anak sudah lulus pendidikan Sekolah Dasar tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak sudah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak dan anak mengetahui rencana pernikahan ini dan menyetujuinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah awal mulanya datang dari calonnya anak dan anak sendiri lalu orang tua masing-masing menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada calonnya anak atau anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga calonnya anak dan keluarga anak tidak ada hutang piutang dan tidak ada hutang budi;
- Bahwa calonnya anak dengan anak telah menjalin hubungan sekitar 10 bulan;
- Bahwa alasan mendesak calonnya anak dan anak ingin segera menikah yaitu karena anak telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak sehingga khawatir anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calonnya anak melihat bahwa anak dan calonnya anak sudah siap menikah, karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa calonnya anak melihat penghasilan tersebut sudah cukup membiayai kebutuhan rumah tangganya kelak dengan anak;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi untuk menguji kesiapan mentalnya untuk menikah;

Halaman 11 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga
- Bahwa calonnya anak dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara anak dan calonnya anak serta tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan atau semenda;
- Bahwa calonnya anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu calonnya anak bahwa anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calonnya anak khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan calonnya anak juga khawatir tidak sanggup menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Agama apabila harus menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak bernama Ajeng Auliya Anggreyani di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada anak dalam sidang tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, Hakim selanjutnya memeriksa dan mendengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak adalah anak kandung daripada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan anak tinggal serta dirawat oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa anak tidak mempunyai ayah sah karena ibu anak saat hamil dan melahirkan anak, ibu dari anak tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan anak lahir di luar perkawinan;

Halaman 12 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa anak mengetahui maksud permohonan Dispensasi Kawin ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak menikahkan anak dengan calonnya karena anak masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 15 tahun 05 bulan dan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak telah lulus pendidikan Sekolah Dasar tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa anak dan calonnya anak sendiri mengetahui dan menyetujui terhadap rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak mengenal dan berhubungan dekat dengan calonnya anak sudah sekitar 10 bulan;
- Bahwa rencana awal pernikahan datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri lalu masing-masing orang tua anak dan orang tua calonnya anak menyetujuinya;
- Bahwa anak ingin menikah atas dasar keinginan anak dan calonnya sendiri, tidak ada pihak manapun yang memaksa anak atau calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hubungan hutang budi;
- Bahwa alasan mendesak anak dan calonnya anak ingin segera menikah yaitu karena anak telah hamil di luar nikah hasil hubungan badan/intim dengan calonnya anak sehingga khawatir anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa anak melihat penghasilan calonnya anak sudah cukup memenuhi kebutuhan anak dan calonnya anak setelah menikah;
- Bahwa anak melihat, anak dan calonnya anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, karena keinginan menikah datang dari

Halaman 13 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

- Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah/saudara, semenda, atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak belum pernah menikah, demikian juga calonnya anak belum pernah menikah;
- Bahwa anak khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan anak juga khawatir tidak sanggup menjaga diri dari mengulangi perbuatan yang dilarang Agama apabila harus menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Gunadi, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 14 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Marsih, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nikko Setiawan, Nomor Induk Kependudukan XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, tanggal 19 Mei 1990. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ajeng Auliya Anggreyani Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 29 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nikko Setiawan Nomor XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 26 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarni Nomor 3316160312080001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 13 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunadi Nomor XXXX0, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 15 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



Sipil Kabupaten Blora, tanggal 15 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pengkolrejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora, tanggal 18 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi surat penolakan nikah/perkawinan Nomor XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, tanggal 24 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat rekomendasi/keterangan layak nikah atas nama Nikko Setiawan dan Ajeng Auliya Anggreyani, nomor XXX, dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, tanggal 23 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi surat pemeriksaan psikologi atas nama Ajeng Auliya Anggreyani dan Nikko Setiawan, dikeluarkan oleh pihak RSUD Dr. R. Soetijono Blora, tanggal 22 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi surat keterangan Nomor XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, tanggal 17 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 16 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi surat keterangan kehamilan atas nama Ajeng Auliya Anggreyani, nomor XXX dikeluarkan oleh Puskesmas Japah Kabupaten Blora tanggal 21 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi surat keterangan skrining pemeriksaan dan konseling calon pengantin Nomor 812/405/IV/2025 atas nama Ajeng Aulia dan Niko Setiawan, dikeluarkan oleh Puskesmas Japah Kabupaten Blora tanggal 21 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ajeng Auliya Anggreyani dan Nico. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/ IV/2025 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, tanggal 19 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.19;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di XXXX. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Ajeng Auliya Anggreyani;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Pemohon sendiri;

Halaman 17 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai ayah sah karena ibu anak saat hamil dan melahirkan anak, ibu dari anak tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan anak lahir di luar perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dengan calonnya anak tersebut yang bernama Nikko Setiawan;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah Gunadi dan Marsih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dan calonnya anak, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon sekitar 15 tahun 05 bulan sedangkan usia calonnya anak sekitar 21 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah mengetahui mereka akan menikah dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah pertama kali datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri, lalu pihak orang tua masing-masing menyetujui;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kepada anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar selama 10 bulan;
- Bahwa alasan anak dan calonnya anak ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak tersebut telah hamil di luar nikah hasil hubungan badan/intim dengan calonnya tersebut, sehingga dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang akan dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak dan calonnya anak telah mengakui sendiri di depan orang tua dan keluarga masing-masing mereka telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak saat ini telah hamil;

Halaman 18 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat dengan keadaan calonnya anak yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, calonnya anak dan anak mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari apabila menikah nanti, selain itu masing-masing orang tua anak dan calonnya anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calonnya anak apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi melihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tersebut tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu saksi calonnya anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang kembali perbuatan yang dilarang Agama;

Halaman 19 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



– Bahwa keadaan seorang perempuan yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

2. **SASKI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di XXXX Kabupaten Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal denga Pemohon yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Ajeng Auliya Anggreyani;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai ayah sah karena ibu anak saat hamil dan melahirkan anak, ibu dari anak tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan anak lahir di luar perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dengan calonnya anak tersebut yang bernama Nikko Setiawan;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah Gunadi dan Marsih;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak tersebut dan orang tua calonnya anak ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi usia anak saat ini sekitar 15 tahun 05 bulan, sedangkan usia calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun 05 bulan;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calonnya anak sendiri serta mereka berdua setuju;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah anak dan calonnya anak itu sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hutang piutang atau hutang budi;

Halaman 20 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calonnya anak berjalan sudah sekitar 10 bulan;
- Bahwa alasan anak dan calonnya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak tersebut telah hamil di luar nikah hasil hubungan badan/intim dengan calonnya anak tersebut sehingga dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang akan dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak dan calonnya anak telah mengakui sendiri di depan orang tua dan keluarga masing-masing mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak saat ini telah hamil;
- Bahwa yang saksi tahu anak telah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa yang saksi tahu calonnya anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat calonnya anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup apabila menikah nanti, selain itu orang tua masing-masing anak dan calonnya anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calonnya anak apabila menikah nanti;
- Bahwa yang saksi lihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Halaman 21 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



- Bahwa yang saksi ketahui anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi antara calonnya anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak tersebut belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa suami dan anak yang akan dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang kembali perbuatan yang dilarang Agama;
- Bahwa keadaan seorang perempuan yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1)

Halaman 22 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* termasuk kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 15, 16, 17 dan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa pengacara/advokat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian di atas sebelumnya penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang

Halaman 23 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



berperka beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Pemohon kepada penerima kuasa yaitu advokat/pengacara telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blora, sehingga Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili

Halaman 24 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon secara formil;

Penasehatan Pemohon Dan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut anak), calonnya anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta orang tua dari calonnya anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calonnya anak serta orang tua calonnya anak mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun Pemohon, anak, calonnya anak serta orang tua calonnya anak tetap ingin melanjutkan perkawinan;

Keterangan Pemohon Dan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon, calonnya anak dan orang tua calonnya anak di dalam persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calonnya anak telah memberikan pernyataan di persidangan akan bertanggungjawab membantu anak dan calonnya anak terkait masalah yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga anak dan calonnya anak apabila permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan anak dalam persidangan tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran Pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g jo pasal 15 huruf a Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa keterangan anak dalam persidangan tanpa kehadiran Pemohon untuk memberikan perlakuan khusus

Halaman 25 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



dalam pemeriksaan keterangan bagi anak. Anak adalah pihak yang harus dihadirkan dan didengar serta diperiksa keterangannya dalam perkara *a quo*. Sehingga Hakim mempertimbangkan anak merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak dengan Pemohon serta potensi tekanan di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenarnya, maka diperlukan pemeriksaan dalam sidang tanpa kehadiran Pemohon;

Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat P.1 sampai dengan P.19, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.19 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maskud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 sampai P.19 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya mengenai relevansi muatan materi isi dari alat bukti tersebut dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Surat/Keterangan Penolakan KUA, adalah alat bukti tertulis/surat yang menurut isi dan bentuknya telah sesuai peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta otentik;
- Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti tertulis/surat berupa Kartu Keluarga meskipun merupakan akta otentik, namun materi sepanjang mengenai keterangan hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti langsung peristiwa perkawinan dan peristiwa kelahiran sebagai dasar hukum hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, karena peristiwa tersebut telah ditentukan bentuk akta otentik dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga bukti tersebut sepanjang muatan materinya mengenai keterangan hubungan hukum suami-istri dan hubungan hukum orang tua-anak cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karena itu bukti tertulis/surat tersebut perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;
- Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat rekomendasi/keterangan layak nikah menurut isi dan bentuknya yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum/Pemerintahan (Dinas Kesehatan Terkait) maka secara hukum bentuknya adalah akta otentik. Sehingga secara hukum kekuatannya

Halaman 27 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



bernilai sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*). Namun sepanjang isinya mengenai pertimbangan dan/atau rekomendasi kelayakan menikah, maka bukti tersebut tidak mengikat Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atau tidak memberikan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dan tidak dapat menjadi satu satunya dasar kelayakan menikah seseorang yang masih di bawah umur 19 tahun, melainkan mesti dihubungkan dengan faktor dan aspek lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat pemeriksaan psikologi menurut isi dan bentuknya bukanlah akta otentik. Bukti tersebut dibuat berdasarkan dan oleh pihak rumah sakit dan pihak pemeriksa psikolog pada rumah sakit sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi sehingga dapat menjalankan pemeriksaan aspek psikologi dan berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak diatur secara khusus bentuk dan format suratnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti surat biasa bukan akta;

– Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas kedudukannya adalah bukti tertulis/surat bukan akta yang secara hukum kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), namun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan psikologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat keterangan dikeluarkan oleh pihak pemerintah kelurahan/desa yang menurut isinya mengenai hubungan seorang dengan orang lain dan mengenai penjelasan penghasilan seseorang, hal mana tidak menjadi bidang yang diberikan wewenang secara khusus dan bentuk serta format surat khusus oleh peraturan perundang-undangan, sehingga nilai bukti tersebut menjadi turun dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karena itu bukti tertulis/surat tersebut perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;



- Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat keterangan (keterangan hamil dan keterangan skrining kesehatan dan konseling calon pengantin) menurut isi dan bentuknya bukanlah akta otentik. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak Dokter dan/atau Bidan pada Puskesmas sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi sehingga dapat menjalankan pemeriksaan kandungan dan/atau pemeriksaan skrining dan konseling calon pengantin, namun tidak diatur secara khusus bentuk dan format suratnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti surat biasa bukan akta. Bukti tertulis/surat bukan akta yang secara hukum kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), namun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan kandungan dan/atau pemeriksaan skrining dan konseling calon pengantin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Bahwa bukti berupa buku kesehatan ibu dan anak ternyata tidak disertai nama dan tandatangan pembuatnya yang merupakan syarat pondasi dan syarat formil dasar suatu bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti-bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah Hakim meneliti materi dan isi daripada bukti-bukti tertulis/surat yang telah dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara formil, Hakim berkesimpulan bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*bukti permulaan hanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup*). Selanjutnya bukti tertulis/surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang alat bukti tersebut sebagaimana berikut;

Halaman 29 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



– Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPerdata;

– Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara *a quo*. Adapun syarat materil dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

– Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidak-setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdata dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPerdata;

– Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdata;

– Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPerdata;

– Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk menggunakannya;

– Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;



Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi yang relevan dengan pokok perkara *a quo* dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Hakim, keterangan mana akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkan bukti surat/tertulis dan keterangan saksi satu sama lain, pembuktian mana yang dipertimbangkan mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara *a quo*, rangkaian pembuktian yang dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materil tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- a) Bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan orang yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blora;
- b) Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan sebaliknya anak adalah anak dari Pemohon;
- c) Bahwa anak Pemohon adalah anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak mempunyai ayah sah secara hukum;
- d) Bahwa anak lahir pada 04 Desember 2009 (umur 15 tahun 05 bulan);
- e) Bahwa calonnya anak adalah anak dari Gunadi dan Marsih sebagai orang tuanya;
- f) Bahwa calonnya anak lahir pada 30 Desember 2003 (umur 21 tahun 05 bulan);
- g) Bahwa rencana pernikahan antara anak dan calonnya anak ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah karena pada saat permohonan diajukan anak belum cukup umur/di bawah umur 19 tahun;
- h) Bahwa anak sedang dalam keadaan telah hamil di luar nikah hasil hubungan dengan calonnya anak;
- i) Bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan calonnya anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;



- j) Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat dan telah melakukan skrining yang diantara hasilnya yaitu keduanya non reaktif dalam hal sifilis, HIV dan Hepatitis;
- k) Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada hubungan saudara/darah/mahram, hubungan semenda atau hubungan sepersusuan;
- l) Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- m) Bahwa anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar 10 bulan;
- n) Bahwa anak dan calonnya anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan insiatif menikah datang dari mereka berdua;
- o) Bahwa anak dan calonnya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- p) Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calonnya anak untuk segera menikah;
- Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan keterangan Pemohon, ayah calonnya anak, calonnya anak dan anak sendiri serta didukung oleh keterangan saksi. Adapun ibu calonnya anak menyatakan bahwa calonnya anak terpaksa menikah karena keadaan anak telah hamil dan didesak oleh Pemohon. Dalam hal ini Hakim merujuk kepada keterangan calonnya anak dan anak sendiri yang menyatakan tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah hal mana juga didukung oleh keterangan Pemohon, ayah calonnya anak serta saksi;
- q) Bahwa anak dan calonnya anak keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- r) Bahwa anak dipertimbangkan/dinilai dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah, dengan aspek kecerdasan umum, stabilitas emosi, tanggungjawab dan komitmen yang dinilai kurang;
- s) Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan



omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas, Pemohon bertempat tinggal di daerah yurisdiksi Kabupaten Blora, maka sesuai Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas pula, maka terbukti Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan beragama Islam sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal atau peristiwa yang telah dibuktikan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua daripada anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut dan keberadaan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pertimbangan mengenai hal atau peristiwa lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan di atas, akan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dan akan menjadi pertimbangan pada bagian petitum atau tuntutan Dispensasi Kawin pada bagian berikutnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain alat-alat bukti dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta keterangan para pihak terkait dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta kongkrit dan temuan-temuan dalam proses persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (Ajeng Auliya Anggreyani);

Halaman 33 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



2. Bahwa anak Pemohon adalah anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak mempunyai ayah sah secara hukum;
3. Bahwa Gunadi dan Marsih adalah orang tua dari calonnya anak (Nikko Setiawan);
4. Bahwa anak (Ajeng Auliya Anggreyani) belum mencapai usia 19 tahun tepatnya berusia 15 tahun 05 bulan;
5. Bahwa calonnya anak (Nikko Setiawan) berusia 21 tahun 05 bulan;
6. Bahwa anak (Ajeng Auliya Anggreyani) telah lulus pendidikan Sekolah Dasar. Calonnya anak (Nikko Setiawan) telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
7. Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Anak dan calonnya anak telah melakukan skrining yang diantara hasilnya yaitu keduanya non reaktif dalam hal sifilis, HIV dan Hepatitis;
8. Bahwa anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar 10 bulan;
9. Bahwa anak (Ajeng Auliya Anggreyani) sedang dalam kondisi telah hamil di luar nikah hasil hubungan dengan calonnya anak (Nikko Setiawan);
10. Bahwa insiatif menikah datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri, serta keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan;
11. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calonnya anak untuk segera menikah;
12. Bahwa anak dan calonnya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
13. Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
14. Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan nikah seperti hubungan saudara/darah/mahram, semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah serta tidak ada indikasi mereka berdua pernah menikah sebelumnya;

Halaman 34 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



15. Bahwa anak dipertimbangkan/dinilai dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah, dengan aspek kecerdasan umum, stabilitas emosi, tanggungjawab dan komitmen yang dinilai kurang;

16. Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem permohonan berdasarkan fakta-fakta di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem pertama permohonan karena keterkaitannya dengan petitem lainnya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan dicukupkan dengan pertimbangan petitem-petitem selanjutnya;

Petitem Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (Ajeng Auliya Anggreyani) untuk menikah dengan calonnya anak (Nikko Setiawan) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem permohonan tersebut, perlu dijabarkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang dispensasi kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* dan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama *in casu* agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pemahaman *a contrario* terhadap ketentuan tersebut tidak diperbolehkan adanya

Halaman 35 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



pemaksaan dari siapapun terhadap seseorang untuk menikah dengan orang lain, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan tentang pengetahuan dan persetujuan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calonnya anak serta latar belakang perkawinan agar tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, ketentuan tentang batas minimal umur bagi seorang perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan adalah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut dapat disimpangi melalui penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) serta Pasal penjelasannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat alasan sangat mendesak diuraikan maksudnya oleh pembuat undang-undang sendiri dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Bertolak dari penjelasan dimaksud, maka dapat dipahami bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti Dispensasi Kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena menjadi jalan satu satunya, dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek atau akibat keadaan atau kondisi yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut mempunyai tujuan hukum yang bermuara diantaranya kepada pemenuhan hak-



hak anak, kepentingan terbaik anak, ketahanan rumah tangga dan kualitas keturunan sebagaimana dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut “...Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin”. Sehingga penyimpangan atas ketentuan batas usia tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, diuraikan mengenai asas-asasnya yang diantaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak selain menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara dan orang tua, menurut hukum juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dan keluarga sebagaimana maksud Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan bahwa eksistensi Dispensasi Kawin berkaitan erat dengan aspek perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus diwujudkan oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua dimana salah satu diantaranya adalah hak untuk



terhindar dari perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur dan/atau di bawah 19 tahun serta hak hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga peraturan perundang-undangan mengatur bahwa termasuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*dalam UU perlindungan anak yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*). Lebih dari itu perkawinan yang melibatkan anak secara melawan hukum, dikategorikan delik tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (*dalam UU TPKS anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*) yang menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (a) undang-undang tersebut yaitu perkawinan anak dan menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (b) undang-undang tersebut yaitu pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila pencegahan perkawinan pada usia anak adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, maka Hakim berpendapat pada dasarnya segala hal yang dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak termasuk atas nama praktek budaya atau fenomena sosial menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal ini tidak lain adalah demi mewujudkan perlindungan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim merumuskan bahwa dalam hal permohonan dispensasi kawin perlu didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek atau faktor pokok yang diantaranya sebagai berikut;

- a. Adanya alasan yang sangat mendesak;
- b. Kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- c. Kesiapan, kematangan dan kesehatan reproduksi anak;

Halaman 38 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



d. Kesiapan dan kestabilan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan temuan persidangan dan fakta persidangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta yang terungkap di persidangan antara anak yang Ajeng Auliya Anggreyani dan calonnya yaitu Nikko Setiawan tidak ada larangan perkawinan. Sehingga menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan keduanya boleh atau tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan anak dan calonnya anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Adapun rencana keinginan perkawinan tersebut bermula dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri kemudian disetujui oleh orang tua masing-masing serta tidak ada paksaan dari siapapun terhadap anak dan/atau calonnya anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun semua ketentuan perkawinan telah dipenuhi, ternyata menurut fakta persidangan terbukti bahwa anak bernama Ajeng Auliya Anggreyani masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 15 tahun 05 bulan. Sehingga anak secara yuridis belum layak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak untuk tujuan perlindungan atas hak-hak dasar anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak dan/atau di bawah 19 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan mendesak yang dimaksud Pemohon pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan dalam surat permohonan dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut fakta atau temuan persidangan telah terbukti bahwa anak Ajeng Auliya Anggreyani sedang dalam kondisi telah hamil akibat berhubungan

Halaman 39 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



badan/intim dengan calonnya Nikko Setiawan di luar nikah sebagaimana fakta atau temuan persidangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta atau temuan persidangan anak Ajeng Auliya Anggreyani sedang dalam kondisi telah hamil akibat berhubungan badan/intim dengan calonnya Nikko Setiawan di luar nikah, apakah cukup sebagai alasan mendesak atau tidak dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang dalam keadaan telah hamil, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa fakta peristiwa tersebut adalah peristiwa yang dilarang dalam ajaran Islam, hal mana hamil di luar pernikahan berarti adalah perzinahan dan perzinahan adalah perbuatan yang termasuk dosa besar;
- Bahwa anak dalam keadaan telah hamil sehingga anak tersebut akan melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan tidak akan mempunyai ayah yang sah apabila anak dan calonnya tidak dinikahkan;
- Bahwa nasab anak yang akan dilahirkan oleh anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin akan terjaga dengan bernasab kepada suami ibunya apabila dilahirkan dalam masa perkawinan ibu dan suami ibunya;
- Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;
- Bahwa pernikahan wanita yang tengah hamil adalah perbuatan hukum yang diperbolehkan dengan syarat dinikahi oleh laki-laki yang menghamili sebagaimana maksud Pasal 53 KHI;
- Bahwa pada sisi lainnya, perkawinan di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (19 tahun) adalah dipandang sebagai suatu *mafsadat* atau *mudlorot* pula oleh negara berdasarkan segala macam pertimbangan legislasi yang bersumber dari berbagai macam data dan dari berbagai macam bidang, diantaranya bidang kesehatan, psikologi, sosial, pendidikan, ekonomi, pemenuhan hak-hak

Halaman 40 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



anak dan lain-lainnya dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

– Bahwa menurut pemeriksaan oleh psikolog yang berwenang dan mempunyai kompetensi, anak telah menjalani serangkaian pengujian dan dipertimbangkan/direkomendasikan serta dinilai sebagai anak yang berkembang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan catatan aspek kecerdasan umum, stabilitas emosi, tanggungjawab dan komitmen yang dinilai kurang. Secara umum dari beberapa aspek psikologi yang diperiksa dan diuji, ternyata separuh dari aspek psikologi anak yang dinilai telah dinyatakan dengan nilai cukup. Hal tersebut menurut Hakim menandakan bahwa anak pada dasarnya belum siap dan belum matang secara komprehensif dari aspek psikologis atau mentalnya untuk memasuki kehidupan rumah tangga;

– Bahwa meskipun terdapat aspek yang dinilai kurang, akan tetapi karena ada alasan keadaan anak telah mengandung/hamil, serta aspek yang dinilai kurang tidak lebih banyak dari yang dinilai telah cukup yang mana dalam penilaian Hakim masih dalam taraf dapat ditoleransi apabila dikaitkan dengan alasan anak telah mengandung/hamil. Selain itu tidak menutup kemungkinan aspek yang dinilai kurang tersebut akan meningkat menjadi cukup seiring waktu;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kesiapan, kematangan dan kesehatan reproduksi anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

– Bahwa dalam permohonan dispensasi kawin, diantara yang perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian adalah aspek kesehatan, kesiapan dan kematangan reproduksi anak. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tujuan norma pembatasan usia perkawinan diantaranya



adalah laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak bagi wanita, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua. Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, dirumuskan norma pembatasan usia perkawinan sehingga diantaranya tidak terjadi kehamilan atau kelahiran pada usia anak atau di bawah 19 tahun yang berpotensi besar menjadi salah satu penyebab kegagalan mewujudkan tujuan hukum tersebut;

– Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu bukti yang menerangkan tentang kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh berdasarkan pemeriksaan medis dan bukan hanya berdasarkan konseling, sehingga dalam perkara *a quo* tidak diketahui mengenai kesehatan, kesiapan dan kelayakan reproduksi anak berdasarkan pemeriksaan dan bukan berdasarkan konseling semata;

– Bahwa meskipun demikian, keadaan anak dalam perkara *a quo* ternyata dalam kondisi telah hamil, sehingga Hakim berpendapat pembahasan tentang menghindari atau mencegah kehamilan atau kelahiran pada usia anak atau di bawah 19 tahun tidak lagi relevan dalam perkara *a quo* karena keadaan anak sendiri telah hamil. Sebaliknya Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan tindakan lain yang dapat melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak baik untuk anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun untuk anak yang akan dilahirkannya nanti (*dalam UU perlindungan anak, termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih dalam kandungan*) diantaranya adalah tindakan tindakan yang dapat mendukung kehamilan yang sehat dan kelahiran yang sehat dan menyelamatkan ibu dan anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calonnya anak terbukti telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 setiap bulan. Selain itu Pemohon dan orang tua calonnya anak

Halaman 42 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



berkomitmen membantu jika ada permasalahan di kemudian hari sebagaimana keterangan yang diberikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan kedua hal tersebut (*perkawinan di bawah umur 19 tahun karena hamil di luar nikah dan perkawinan setelah umur 19 tahun yang berpotensi setelah melahirkan anak di luar nikah*) di atas memiliki wajah *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalah* nya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua hal sebagaimana dipertimbangkan di atas yang memiliki wajah atau aspek *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalah* nya masing-masing tersebut perlu dinilai derajat, level dan tingkat kadarnya. Untuk mengukur dan menentukan mana yang lebih ringan derajat, level dan tingkat kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya serta menilai mendesak atau tidaknya alasan dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencegahan atas terjadinya suatu peristiwa yang dilarang atau *mafsadat* atau *mudlorot* dalam hukum Islam tidak dibenarkan dan sedapat mungkin tidak dilakukan dengan cara mendatangkan *mafsadat* atau *mudlorot* lainnya, apalagi bila *mafsadat* atau *mudlorot* yang didatangkan tersebut ternyata sepadan atau bahkan lebih besar daripada yang akan dicegah atau dihindari. Sehingga apabila dihadapkan dengan dua hal *mafsadat* atau *mudlorot* yang tidak dapat dihindari, dan dapat dinilai antara keduanya mana yang lebih ringan kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya, maka dipilih tindakan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya lebih ringan. Hal tersebut juga telah dirumuskan dalam kaidah fikih sebagaimana diuraikan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair (*hal. 42, Juz 1*) yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

الضرر لا يزال بالضرر...ومنها إذا وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بما
يغرقه، ورأه أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله ذلك على
الأصح

Artinya; “kemudlorotan tidak dihilangkan dengan kemudlorotan lainnya...termasuk (contoh) dari kaidah tersebut adalah apabila

Halaman 43 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



seseorang terjatuh ke dalam api yang membakarnya dan dia tidak dapat lepas atau bebas (dari api) kecuali dengan air yang menenggelamkannya, kemudian orang tersebut menilainya (air yang menenggelamkannya) adalah lebih mudah untuk bersabar daripada panas api yang menghanguskan, maka hal itu dapat dilakukan oleh orang tersebut menurut pendapat yang lebih sah"

– Bahwa dalam hukum Islam apabila bertemu dua *mafsadat* atau *mudlorot* dalam satu titik, maka penyelesaiannya adalah dengan memilih dan mengutamakan peristiwa atau keadaan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorot* lebih ringan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضرارا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua *mafsadah* saling berhadapan/bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *mudharatnya* dengan memilih yang lebih ringan *mudharatnya*"

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan berbagai pertimbangan yang meliputi beberapa aspek sebagaimana telah terurai sebelumnya, Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* bahwa keadaan menikahkan anak dengan calonnya anak karena telah mengandung/hamil sehingga anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak melahirkan tanpa suami serta anak yang sedang dikandungnya terhindar dari lahir tanpa ayah adalah lebih ringan *mudlorot* atau *mafsadatnya* daripada menikah setelah umur 19 tahun setelah melahirkan anak di luar nikah (tidak dinikahkan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat jalan menikahkan anak yang telah hamil dengan calonnya anak adalah demi kepentingan terbaik untuk anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin itu sendiri maupun untuk anaknya yang akan dilahirkan nantinya. Hal tersebut karena dengan jalan perkawinan itu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terselamatkan dari melahirkan tanpa suami dan hanya dengan perkawinan anak yang akan dilahirkan terselamatkan dari lahir tanpa ayah sah dan nasabnya tetap dapat terpelihara. Begitupula hanya dengan jalan perkawinan, calonnya anak akan terjaga dan terpelihara hubungannya sebagai



ayah sah dengan anak yang akan dilahirkan. Dengan kata lain bahwa jalan perkawinan dalam perkara *a quo* adalah jalan yang di dalamnya terkandung tujuan pemeliharaan keturunan dan nasab atau *hifdzu al-nasl* (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keadaan anak yang telah hamil tersebut cukup menjadi alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak atau di bawah 19 tahun dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berangkat dari segala pertimbangan di atas, Hakim sampai pada kesimpulan bahwa permohonan *a quo* ternyata telah cukup ditemukan alasan yang sifatnya sangat mendesak sehingga perkawinan di bawah usia 19 tahun antara anak dan calonnya anak adalah pilihan satu-satunya yang harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain serta Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* keadaan menikahkan anak dengan calonnya anak lebih ringan kadar *mafsadat* dan *mudhorotnya* daripada keadaan tidak menikahkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (Ajeng Auliya Anggreyani) untuk menikah dengan calonnya anak (Nikko Setiawan), telah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum penetapan ini;

Petitem Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitem terakhir, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 45 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla



MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqoidah 1446 Hijriah, oleh **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Istirochah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Istirochah, S.H.

Perincian Biaya;

1	PNBP				
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00		
	-		Relaas	:	Rp 10.000,00
			Panggilan I		
	-		Redaksi	:	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00		
3	Panggilan	:		Rp 0,00	
4	Sumpah	:		Rp 100.000,00	
5	Meterai	:		Rp 10.000,00	
	Jumlah	:		Rp 260.000,00	
				(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 46 dari 46 penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bla